

PERKEMBANGAN TERBARU DALAM PARADIGMA ADMINISTRASI PUBLIK: NEW PUBLIC GOVERNANCE

Recent Developments in the Public Administration Paradigm: New Public Governance

Muhammad Ali & Lalu Muh. Kabul

Universitas Muhammadiyah Mataram; Universitas Teknologi Mataram
khaidiralihsan@gmail.com; lpp.lombok@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Apr 1, 2025	Apr 15, 2025	Apr 27, 2025	May 2, 2025

Abstract

The research is motivated by the difference paradigms in public administrative science such as public administration paradigm of Nicholas Henry, Mark, and Osborne. The difference occurred due to there is no classification yet. The research aims to analyze latest development in revolutionary paradigm of public administration. A qualitative approach is employed, utilizing literature review with an integrative technique. Data is collected from various sources such as articles, books, and other text, and analyzed by content analysis. The result indicate that public administrative science can be classified into two paradigms, namely evolutionary paradigm and revolutionary paradigm. A public administration paradigm of Nicholas Henry can be classified into evolutionary paradigm. Meanwhile, a public administration paradigm of Mark and Osborne can be classified into revolutionary paradigm. In the context of revolutionary paradigm, latest development paradigm of public administration is new public governance.

Keywords: Paradigm, Public Administration, Evolutionary, Revolutionary, New Public Governance.

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan paradigma dalam ilmu administrasi publik seperti paradigma administrasi publik menurut Nicholas Henry, Mark, dan Osborne. Perbedaan ini terjadi karena belum adanya klasifikasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan terbaru dalam paradigma revolutif administrasi publik. Dalam penelitian digunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan teknik integratif. Data yang dikumpulkan berasal dari berbagai sumber seperti artikel, buku, dan teks lainnya kemudian dianalisis dengan menggunakan “content analysis”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ilmu administrasi publik dapat diklasifikasikan kedalam 2 (dua) paradigma, yaitu paradigma evolutif dan paradigma revolutif. Paradigma administrasi publik yang dikemukakan oleh Nicolas Henry dapat diklasifikasikan kedalam paradigma evolutif. Sementara, paradigma administrasi publik menurut Mark dan Osborne dapat diklasifikasikan kedalam paradigma revolutif. Dalam konteks paradigma revolutif, perkembangan terbaru dalam paradigma administrasi publik adalah new public governance.

Kata Kunci: Paradigma, Administrasi Publik, Evolutif, Revolutif, New Public Governance

PENDAHULUAN

Sistem administrasi telah dikenal sejak 1491 SM. Ketika Nabi Musa bermigrasi dari Mesir ia mengikuti saran ayah mertuanya Jethro untuk melakukan delegasi kekuasaan berdasarkan garis hierarki kekuasaan (Basheka, 2012). Dalam konteks delegasi Nabi Musa tersebut disebutkan dalam kitab Suci Al-Qur'an (Taha:29-30) agar dijadikan untuknya seorang penolong dari keluarganya yaitu Harun saudaranya. Struktur pemerintahan di Mesir terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kekuasaan tertinggi berada di tangan Raja yang disebut *Pharaoh* dan dibantu oleh Perdana Menteri. Di Mesir dikenal *Ptolemies* sebagai sebuah sistem administrasi untuk memerangi pihak-pihak yang melemahkan pemerintah pusat termasuk pihak-pihak yang ingin memisahkan diri dari pemerintah pusat. Pemerintahan kerajaan Mesir mulai melemah setelah 1100 SM karena tidak efektifnya sistem administrasi (Ajdini, 2014).

Di China pada masa kekuasaan Dinasti Han (206 SM-220 SM) mengadopsi konsep Konfusianisme dimana aparat pemerintahan harus dipegang oleh orang-orang dipilih berdasarkan bakat dan kemampuannya bukan berdasarkan keturunan (Hughes, 2019). Pada tahun 124 SM telah ada universitas di China yang mengajarkan administrasi publik dengan jumlah mahasiswa sebanyak 50 orang dengan usia 18 tahun keatas dimana mahasiswa

tersebut diseleksi dari setiap provinsi (Basheka, 2012). Di Kekaisaran Roma dibawah Kaisar Marcus Tullius Cicero (106SM-43SM) sistem administrasi berkembang pesat dimana sistem administrasi dipegang oleh pelayan publik yang disebut *praefetus urbi* (Ajdini, 2014). Pada awalnya sistem administrasi bersifat personal dimana loyalitas pada individu tertentu seperti Raja atau Perdana Menteri bukan impersonal berdasarkan legalitas dan loyalitas terhadap organisasi dan negara (Hughes, 2019). Hal inilah yang menjadi penyebab terjadinya korupsi dan penyalahgunaan kewenangan.

Lebih jauh Hughes (2019) menyatakan bahwa di Amerika Serikat pada abad ke-19 terdapat sistem administrasi *spoils* dimana setelah pemilihan umum (pemilu) selesai semua jabatan administrasi dari posisi yang paling tinggi hingga terendah diisi dan diangkat oleh partai pemenang pemilu. Hal ini mencapai puncaknya pada tahun 1830 pada masa pemerintahan Presiden Andrew Jackson. Sistem administrasi *spoils* itulah yang menjadi penyebab terjadinya korupsi endemik dalam pemerintahan. Sistem administrasi *spoils* tersebut kemudian direformasi di Amerika Serikat yang dipelopori oleh Woodrow Wilson dan di Eropah oleh Wax Weber. Berdasarkan birokrasi Weber dikenal pelayan publik profesional, rekrutmen dan penunjukannya berdasarkan meritokrasi, netralitas politik. Disisi lain, pemikiran Wilson melahirkan pandangan bahwa politik bertanggungjawab dalam pembuatan kebijakan, sedangkan administrasi pada pelaksanaannya.

Paradigma ilmu pengetahuan atau sains meliputi paradigma evolutif dan paradigma revolutif (Samudra dan Suradika, 2022; Coccia, 2019). Paradigma evolutif dalam bidang biologi dipelopori oleh Darwain (1859) dalam karyanya *On the Origin of Species* kemudian dalam ilmu sosial oleh Herbert Spencer (1902) dan dalam bidang ilmu administrasi publik oleh Nicholas Henry (1995). Dalam pada itu, Nicholas Henry (1995) dalam Basheka (2012) dan Keban (2019) menyatakan bahwa paradigma administrasi publik meliputi paradigma 1: dikotomi politik dan administrasi (1887-1926), paradigma 2: prinsip-prinsip administrasi (1927-1937), paradigma 3: ilmu administrasi publik sebagai ilmu politik (1950-1970), paradigma 4: ilmu administrasi publik sebagai manajemen (1950-1970), paradigma 5: ilmu administrasi publik sebagai ilmu administrasi publik (1970-sekarang).

Sejauh ini paradigma revolutif yang banyak dikenal dalam administrasi publik meliputi paradigma *old public administration*, *new public management*, dan *new public services* (Mark, 2015 ; Keban, 2019). Penelitian ini berbeda dengan paradigm revolutif sebelumnya dimana fokus penelitian ini pada perkembangan terbaru dalam paradigma administrasi publik yaitu *new public governance* (Osborne, 2010 ; Krog & Triantafillou, 2024). Berkaitan dengan hal tersebut,

maka tujuan penelitian yaitu menganalisis perkembangan paradigma revolutif administrasi publik mulai dari tahap *old public administration* hingga *new public governance*.

METODE

Dalam penelitian ini digunakan metode studi pustaka (*library research*). Dalam metode studi pustaka dikenal tiga jenis pendekatan, yaitu sistematis, semi-sistematis, dan integratif (Snyder, 2019). Dalam penelitian ini digunakan pendekatan integratif dengan pertimbangan dimana penelitian ini dimaksudkan sebagai sebuah kritik dan sintesa dengan tahapan meliputi pengumpulan data untuk memahami dan mempelajari teori-teori yang bersumber dari artikel, buku, dan teks publikasi lainnya, kemudian data dianalisis secara kualitatif dan kontribusi penelitian pada model teoritis.

Data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan *content analysis* untuk memperoleh pengambilan kesimpulan yang valid dan dapat direplikasi dari teks menuju konteks (Macnamara, 2018 ; Elo, 2020).

HASIL

Paradigma Revolutif Kuhn

Thomas S. Kuhn dalam karyanya *The Structure of Scientific Revolutions* yang diterbitkan pada tahun 1962 menolak pemikiran Auguste Comte tentang positivisme dan falsifikasi Karl Popper. Menurut Kuhn bahwa perkembangan ilmu pengetahuan (sains) tidaklah terjadi secara kumulatif melalui verifikasi dan falsifikasi teori, melainkan melalui perubahan sangat mendasar yang disebut revolusi ilmiah. Lebih jauh Kuhn menyatakan bahwa kebenaran sains bersifat relatif, sehingga kapanpun dapat direvolusi, yaitu ketika paradigma lama digantikan oleh paradigma baru. Paradigma berasal dari bahasa Yunani yaitu *para* berarti disamping dan *deiknumi* berarti model atau contoh. Oleh Kuhn paradigma didefinisikan sebagai praktek ilmiah aktual contohnya hukum, teori, aplikasi, dan instrumen yang diterima bersama sebagai sumber tradisi khusus dalam penelitian ilmiah (Kusuma & Hidayat, 2020).

Paradigma sains ibarat lensa melaluinya ilmuwan dapat mengamati dan memahami masalah-masalah ilmiah dan jawaban ilmiah terhadap masalah-masalah tersebut pada bidangnya masing-masing. Paradigma merupakan pola, bentuk atau model untuk menjelaskan suatu proses ide. Disisi lain, paradigma juga merupakan asumsi-asumsi teoritis dan hukum-hukum serta teknik-teknik aplikasi yang dianut secara bersama oleh komunitas

ilmuwan. Revolusi ilmiah terjadi melalui perubahan paradigma yakni ketika digantikannya paradigma lama oleh paradigma baru (Anand et al, 2020). Kuhn menjelaskan bahwa apabila paradigma lama atau teori yang dihasilkan masih mendukung paradigma lama, maka sains berada pada kondisi normal (*normal science*). Tetapi apabila di suatu masa ditemukan penyimpangan terhadap *normal science* yang tidak dapat dijelaskan oleh paradigma lama, maka kondisi ini disebut *anomali*. Akhirnya paradigma lama mengalami *kerisis* dan kemudian terjadi revolusi ilmiah dengan ditemukan atau dibangunnya paradigma baru. Setelah revolusi ilmiah dengan ditemukannya paradigma baru yang didukung oleh teori-teori baru, maka sains kembali ke kondisi normal atau *normal science* (Takdir & Arif, 2022 ; Giere, 2022). Dalam pada itu, kerangka pemikiran Kuhn dalam proses revolusi ilmiah ditampilkan pada gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Revolusi Ilmiah Kuhn

Sumber: Diolah dari Anand et al (2020)

Berikut dikemukakan penerapan revolusi ilmiah Kuhn dalam Fisika. Dalam hukum gravitasi Newton disebutkan bahwa gravitasi disebabkan oleh adanya gaya tarik-menarik dari sebuah benda dengan benda lainnya yang besarnya berbanding lurus dengan masa kedua benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua benda tersebut. Dalam tata surya, gravitasi inilah yang mempengaruhi bentuk garis edar planet mulai dari Merkurius, Venus, Bumi, Mars hingga Pluto terhadap matahari. Menurut hukum gravitasi Newton jika yang ditinjau hanya pengaruh gravitasi matahari terhadap planet Merkurius, maka garis edarnya berupa elips sempurna dengan matahari berada pada salah satu titik apinya. Tetapi jika pengaruh gravitasi planet lainnya juga diperhitungkan, maka garis edar planet Merkurius tidak lagi berupa elips sempurna, tetapi elips yang bergerak atau elips yang berpresesi (bergeser). Ini berarti bahwa setelah melakukan satu putaran penuh mengelilingi matahari, planet Merkurius tidak kembali ke kedudukannya yang semula, tetapi bergerak menjauhinya. Berdasarkan hukum gravitasi Newton seharusnya diperoleh sudut geser planet Merkurius setiap seratus tahun atau satu abad sebesar 5557,62 detik busur. Namun terjadi penyimpangan yang justru muncul sebagai “anomali” bagi ilmuwan dimana berdasarkan hasil pengamatan sudut geser planet Merkurius setiap satu abad besarnya 5600,73 detik busur atau terjadi penyimpangan sebesar 43,11 detik busur.

Adanya *anomali* ini kemudian melahirkan *krisis* dimana hukum gravitasi Newton sebagai pradigma lama tidak mampu menjelaskan penyimpangan tersebut, kemudian ditemukan paradigma baru yang dibangun oleh teori Einstein yang menyatakan bahwa gravitasi disebabkan oleh kelengkungan ruang-waktu. Terjadi revolusi ilmiah dimana hukum gravitasi Newton yang merupakan paradigma lama digantikan oleh teori Einstein sebagai paradigma baru. Selain Fisika berikut dikemukakan penerapan revolusi ilmiah Kuhn dalam ilmu ekonomi. Ahli ekonomi A.W.Phillips pada tahun 1958 berdasarkan perekonomian Inggris 1861-1957 menyatakan adanya hubungan negatif antara tingkat inflasi dan tingkat pengangguran yang selanjutnya disebut sebagai Kurva Phillips. Artinya jika tingkat inflasi naik, maka tingkat pengangguran turun, demikian sebaliknya jika tingkat inflasi turun, maka tingkat pengangguran naik.

. Seiring dengan terjadinya stagflasi di negara-negara industri pada tahun 1970-an terjadi penyimpangan yang menimbulkan *anomali* dimana berdasarkan data tingkat inflasi rata-rata dan tingkat pengangguran rata-rata pada 7 (tujuh) negara industri yaitu Perancis, Jerman, Itali, Jepang, Swedia, Inggris, dan Amerika Serikat menunjukkan adanya hubungan positif antara tingkat inflasi dan tingkat pengangguran. Tingkat inflasi rata-rata di 7 (tujuh) negara industri tersebut mengalami peningkatan dari 3,7 persen pada tahun 1961-1965 menjadi 4,1 persen pada tahun 1966-1970 dan 9,3 persen pada tahun 1971-1975. Kenaikan tingkat inflasi tersebut diikuti dengan naiknya tingkat pengangguran dari 2,0 persen pada tahun 1961-1965 menjadi 2,2 persen pada tahun 1966-1970 dan 2,9 persen pada tahun 1971-1975. Hubungan positif antara tingkat inflasi dan tingkat pengangguran tersebut dikemukakan oleh Milton Friedman dan Edmund Phelps pada tahun 1968 yang kemudian dikenal sebagai Kurva Friedman-Phelps.

Dalam pada itu, *anomali* tersebut kemudian melahirkan *krisis* dimana Kurva Phillips sebagai pradigma lama tidak mampu menjelaskan penyimpangan tersebut, kemudian ditemukan paradigma baru yang dibangun oleh Friedman dan Phelps yang disebut Kurva Friedman-Phelps. Akhirnya terjadi revolusi ilmiah dimana Kurva Phillips yang merupakan paradigma lama digantikan oleh Kurva Friedman-Phelps sebagai paradigma baru

Paradigma Revolutif Adminitrasi Publik

Perubahan paradigma sains secara revolutif tidak hanya terjadi pada Fisika dan Ekonomi, tetapi juga pada disiplin ilmu lainnya termasuk administrasi publik. Paradigma revolutif administrasi publik dimulai dari *old public administration* kemudian bergeser ke *new public*

management, new public services dan kini yang terbaru adalah *new public governance* sebagaimana ditampilkan pada tabel 1 (Mark, 2015; Keban, 2019 ; Osborne, 2010; Osborne, 2016).

Tabel 1. Perkembangan Paradigma Administrasi Publik

	Old Public Administration	New Public Management	New Public Services	New Public Governance
Dasar teori	Teori Politik	Teori Ekonomi & Manajemen	Teori Demokrasi	Teori Kelembagaan & Jejaring
Fokus	Sistem Politik	Organisasi	Organisasi	Organisasi dan Lingkungannya
Mekanisme alokasi sumber daya	Hierarki	Pasar	Hierarki	Jejaring
Peran Pemerintah	Rowing	Steering	Serving	Collaborating
Konsepsi kepentingan public	Politis	Agregasi kepentingan individu	Dialog berbagai nilai	Kolaborasi berbagai sumberdaya
Sasaran pelayanan	Klien & konstituen	Pelanggan	Warganegara	Warganegara
Mekanisme untuk mencapai sasaran kebijakan	Adminsitasi program melalui lembaga pemerintah	Peciptaan mekanisme melalui lembaga swasta dan lembaga nirlaba	Membangun koalisi publik dengan lembaga nirlaba	Membangun kolaborasi publik dengan lembaga nirlaba & masyarakat

Sumber : Diolah dari Keban (2019), Mark (2015) dan Osborne (2016)

PEMBAHASAN

Old Public Administration

Gagasan Max Weber mengenai administrasi publik pada tahun 1921 dan Woodrow Wilson pada tahun 1887 merupakan model birokrasi berdasarkan pendekatan hierarki dan meritokrasi. Pendekatan tersebut digunakan sebagai reformasi birokrasi di Inggris dan Prusia pada akhir abad ke-19 untuk mengatasi sistem patrimonial dimana patronase mendominasi keputusan pemerintah. Dalam pendekatan ini pengawasan bersifat terpusat, adanya seperangkat aturan dan pedoman, terpisahnya pembuatan kebijakan dari implementasi, dan adanya struktur birokrasi yang bersifat hierarkis. Pendekatan komando dan pengawasan

dalam administrasi publik menjadi rujukan sistem birokrasi yang diperkenalkan di dunia dibawah aturan kolonial dan setelah kemerdekaan pada hampir semua negara. Pendekatan *old public administration* dipelopori oleh Max Weber, Woodrow Wilson, Frederick Taylor, Luther Gulick, Herbert Simon, dan lain-lain (Mark, 2015 : Hughes, 2019).

Perancis dan Jepang misalnya menerapkan model birokrasi terpusat dalam pemerintahannya, demikian pula China dalam konteks satu partai. Pasca kolonial berbagai negara mengalami penurunan kualitas pemerintahan dan efektivitas administrasi publik dalam beberapa tahun karena adanya tekanan *neo-patrimonial* dan sumber daya publik hanya dinikmati oleh pimpinan politik dan pengikutnya. Pada akhir tahun 1940-an hingga tahun 1970-an birokrasi pemerintah selain hierarkis, juga tidak efisien, dan yang dilayani justru birokrasi, bukan warga masyarakat (Byrkjeflot et al, 2017).

New Public Management

New Public Management (NPM) merupakan pendekatan baru dalam administrasi publik dan manajemen yang muncul di sejumlah negara OECD pada tahun 1980-an. Model NPM merupakan reaksi atas keterbatasan *old public administration* dalam menghadapi kompetitifnya ekonomi pasar. Disisi lain, kandungan biaya merupakan faktor kunci yang diadopsi dalam pendekatan NPM, menyuntikkan prinsip-prinsip kompetisi dan manajemen sektor swasta sebagai inti pendekatan NPM. Elemen kunci NPM meliputi pembelajaran dari manajemen sektor swasta, fokus pada kepemimpinan kewirausahaan dalam organisasi pelayanan publik, penekanan pada input dan pengawasan output, evaluasi manajemen kinerja dan audit, fokus pada manajemen biaya, pertumbuhan berbasis pasar, kompetisi dan kontrak untuk alokasi sumberdaya dan penyediaan layanan dalam pelayanan publik (Mark, 2015).

Pendekatan NPM berawal di Inggris, Selandia Baru, Amerika Serikat, dan Skandinavia. Pada pertengahan tahun 1980-an pendekatan NPM menghasilkan perubahan signifikan pada etos dan pendekatan sektor publik, khususnya pembudayaan praktek manajemen baru, pemasaran dan mengontrakkan pelayanan kepada perusahaan swasta dan organisasi nirlaba. Manajemen hasil mengganti orientasi sektor publik yang diatur oleh input dan output, serta makin meresapnya manajemen kerja kedalam sektor publik (Haligan, 2022). Menurut Huhges (2019) bahwa istilah lain yang lazim digunakan untuk pendekatan NPM antara yaitu *managerialism* (Pollit, 1990), *new public management* (Hood, 1997), *market-based public administration*, *entrepreneurial government* (Osborne & Gaebler, 1992).

New Public Services

Pendekatan *New Public Services* (NPS) fokus pada warga masyarakat dan masyarakat. Dalam pendekatan NPS peran utama dari pelayan publik adalah membantu warga masyarakat untuk mengartikulasikan dan memenuhi kepentingan bersama, bukan mengawasi ataupun mengarahkan seperti pada pendekatan NPM. Selain itu, pendekatan NPS berbeda dengan NPM yang menekankan pada transaksi antara manajemen publik dengan pelanggan yang merefleksikan kepentingan individu berdasarkan prinsip pasar. NPS juga berbeda dengan *old public administration* dimana warga masyarakat dalam kaitannya dengan birokrasi sebagai klien atau konstituen yang diperlukan sebagai penerima pasif berdasarkan pembuatan kebijakan *top-down* dalam mekanisme pemberian pelayanan. Menurut Mark (2015) bahwa pendekatan NPS ini antara lain dipelopori oleh Robert B. Denhardt (1981), King & Stivers (1998), Robert Putnam (2000), Janet V. Denhardt & Robert B. Denhardt (2007).

Dalam NPS, birokrasi bukan mengawasi atau mengarahkan warga masyarakat dalam pemecahan masalah kebijakan, tetap lebih fokus pada menjembatani, negosiasi dan pemecahan permasalahan kompleks melalui kemitraan dengan warga masyarakat. Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat pemerintah dituntut untuk terbuka dan menyediakan akses, akuntabel, responsif, dan bekerja melayani warga masyarakat. Dalam hal itu, NPS meliputi 4 (empat) elemen, yaitu: (1) membangun hubungan kolaboratif dengan warga masyarakat dan kelompok masyarakat, (2) mendorong tanggung jawab bersama, (3) desiminasi informasi untuk meningkatkan diskursus publik dan isu publik, (4) melibatkan peran warga masyarakat dalam berbagai kegiatan pemerintah (Mark, 2015).

New Public Governance

Pendekatan *New Public Governance* (NPG) berbeda dengan *old public administration* yang lebih menekankan pada hierarki birokrasi dan juga berbeda dengan NPM yang menekankan pada diskresi manajerial dan mekanisme kontrak. Pendekatan NPG menempatkan warga masyarakat sebagai kerangka rujukan, bukan pemerintah. Dalam hal itu, pendekatan NPG lahir sebagai sebuah produk dan respon terhadap begitu kompleks, beragam, dan terpencarnya implementasi kebijakan publik dan penyediaan layanan pada abad ke-21. Peran sentral warga masyarakat sebagai bagian dari pembuatan kebijakan dan penyedia layanan merupakan hal mendasar yang membedakan NPG dengan *old public administration* dan NPM. Dalam NPG, pembuatan kebijakan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah sebagai aktor tunggal, melainkan beragam aktor. Artinya, pemerintah tidak lagi sebagai aktor tunggal dalam

pembuatan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan (Mark, 2015 ; Kennet, 2010). Menurut Mark (2015) dan Osborne (2010) bahwa pendekatan NPG ini antara lain dipelopori oleh Osborne (2010), Osborne (2016), Peters (2010), O.Toole (2010), Martin (2010)

Pendekatan NPG menekankan pada proses relasi antar-organisasi yang dilandasi pada relasi saling percaya (*trust*) pada relasi modal, dan relasi kontrak melayani sebagai mekanisme utama, bukan pada bentuk dan fungsi organisasi. Dalam pendekatan administrasi konvensional, proses relasi antar-organisasi tersebut merupakan domain pemerintah yang membedakannya dengan organisasi swasta dan organisasi nir-laba. Disisi lain, mekanisme alokasi sumber daya dilakukan melalui jaringan antar-organisasi dan akuntabilitasnya dinegoisasikan dalam jaringan antar-organisasi (Osborne, 2016 ; Patapas et al, 2014).

KESIMPULAN

Dalam ilmu administrasi publik ditemukan adanya perbedaan dalam paradigma administrasi publik seperti yang dikemukakan oleh Nicholas Henry, Mark, dan Osborne. Disatu sisi, paradigma administrasi publik menurut Nicholas Henry meliputi 5 (lima) paradigma, yaitu paradigma 1:dikotomi politik dan administrasi (1887-1926), paradigma 2:prinsip-prinsip administrasi (1927-1937), paradigme 3:ilmu administrasi publik sebagai ilmu politik (1950-1970), paradigma 4:ilmu administrasi publik sebagai manajemen (1950-1970), paradigma 5: ilmu administrasi publik sebagai ilmu administrasi publik (1970-sekarang). Disisi lain, paradigme administrasi publik menurut Mark dan Osborne meliputi *old public administration, new public management, new public services*.

Perbedaan paradigma dalam ilmu administrasi publik terjadi karena belum adanya klasifikasi. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ilmu administrasi publik dapat diklasifikasikan kedalam 2 (dua) paradigma, yaitu paradigma evolutif dan paradigma revolutif. Paradigma administrasi publik yang dikemukakan oleh Nicolas Henry termasuk dalam paradigma evolutif. Sedangkan paradigma administrasi publik menurut Mark dan Osborne termasuk dalam paradigma revolutif. Dalam konteks paradigma revolutif, perkembangan terbaru dalam paradigma administrasi publik adalah *new public governance*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajdini, S. (2014). Public Administration in Ancient Rome and Egypt. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 3(6), 385-390. <https://doi.org/10.5901/ajis.2014.v3n6p385>
- Anand, G. et al. (2020). Thomas Kuhn on Paradigm. *Production and Operation Management*, 29(7), 1650-1657. <https://doi.org/10.1111/poms.13188>

- Basheka, B. C. (2012). The Paradigm of Public Administration Re-examined: A Reflection. *Journal of Public Administration*, 47(1), 25-67.
- Byrkjeflot, H. et al. (2017). What is the Neo Weberian State as a Regime of Public Administration? *The Palgrave Handbook of Public Administration and Management in Europe*, 991-1009.
- Coccia, M. (2019). Revolutions and Evolutions dalam A. Farazmand (ed.). *Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance*. Springer Nature, Switzerland, 1-6. https://doi.org/10.1007/978-3-319-31816_3708-1
- Elo, S. et al. (2014). Qualitative Content Analysis: A Focus on Trustworthiness. *Sage Open*, January-March, 1-10. <https://doi.org/10.1177/2158244014522633>
- Giere, R. N. (2022). Philosophy of Science Naturalized. *Philosophy of Science*, 52(3), 331-356. <https://doi.org/10.1086/289255>
- Halligan, J. (2022). Public Management Reform in K. Scheller (ed.). *Elgar Encyclopedia of Public Management*. Edward Elgar, Cheltenham. <https://doi.org/10.4337/9781800375499.public-management.reform>
- Hughes, O. E. (2019). *Public Management and Administration: An Introduction*. Palgrave MacMillan.
- Keban, Y. T. (2019). *Enam Dimensi Strategi Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu*. Penerbit Gava Media.
- Kementerian Agama. (n.d). *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Lembaga Percetakan Al-Qur'an Kementerian Agama RI.
- Krog, A. H. & Triantafillou, P. (2024). Developing New Public Governance as a Public Management Reform Model. *Public Management Review*, 26(10), 3040-3056. <https://doi.org/10.1080/14719037.2024.2313539>
- Kusuma, U. & Hidayat, A. W. (2020). Pemikiran Thomas S. Kuhn Teori Revolusi Paradigma. *Islamadina Journal Pemikiran Islam*, 21(2), 167-187. <https://doi.org/10.30595/islamadina.v21i2.6043>
- Macnamara, J. (2018). Content Analysis dalam P. Napoli (ed.). *Mediated Communication*. de Gruyter Mouton, Berlin, Germany and Boston, MA, 191-212. <https://doi.org/10.101515/9783110481129-012>
- Mark, R. (2015). From Old Public Administration to the Public Sector Reform in Developing Countries. *UNDP Global Centre for Public Services Excellence*, Singapore.
- Osborne, S. P. (2010). *The New Public Governance? Emerging Perspectives on the Theory and Practice of Public Governance*, 1st edition. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203861684>
- Osborne, S. P. (2016). The New Public Governance? *Public Management Review*, 8(3), 377-387. <https://doi.org/10.1080/14719030600853022>
- Patapas, A. et al. (2014). New Public Governance: The Tracks of Change. *International Journal of Business and Social Research*, 4(5), 25-32. <https://doi.org/10.18533/ijbsr.v4i5.478>
- Samudra, A. A. dan Suradika, A. (2022). *Filsafat Ilmu dan Metode Berpikir Transrasional*. Penerbit Samudra Biru.
- Snyder, H. (2019). Literature Review as a Research Methodology: An Overview and Guideline. *Journal of Business Research*, 104, 333-339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Takdir, M. & Arifin, M. (2022). The Scientific Revolution of Thomas S. Kuhn and Its Contribution to the Conflict Resolution Paradigm in Indonesia. *Journal Sosiologi Dialektika*, 17(2), 147-158. <https://dx.doi.org/10.201473/jsd.v17i2.2022.147-158>